

NOTA DINAS
NOMOR B/2023/IIJ-IND/PR/VII/2023

Yth : Menteri Perindustrian
Dari : Inspektur Jenderal
Hal : Penyampaian Laporan PP 39 Inspektorat Jenderal Triwulan II
Tahun 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 14 Juli 2023

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian, dengan ini kami lampirkan Laporan PP 39 Inspektorat Jenderal yang didalamnya berisikan capaian realisasi penyerapan anggaran pada Inspektorat Jenderal hingga Triwulan II Tahun 2023 yaitu Rp19.163.205.930,00 atau 43,56% dari total pagu anggaran sebesar Rp43.989.630.000,00.

Kegiatan yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal pada Triwulan II (April-Juni) 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Pengawasan Kegiatan Hannover Messe;
- 2) Rapat koordinasi pengawasan pada Direktorat Jenderal KPAIL, IKFT, IKMA, ILMATE;
- 3) Menghadiri rapat pimpinan terbatas dengan agenda Pembahasan Pengendalian Internal dan Penegakan Integritas Anti Korupsi;
- 4) Pengawasan kegiatan prioritas satuan kerja;
- 5) Rapat Koordinasi Internal Pembentukan Tim Pengawasan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Periode 2023-2024;

- 6) Menyusun Populasi E-SPI Kementerian Perindustrian dan melakukan pemilihan sampling bersama Tenaga Ahli E-SPI KPK;
- 7) Pemutakhiran SOP sesuai Proses Bisnis Inspektorat Jenderal terbaru.

Demikian kami laporkan, atas perkenan dan arahan Bapak Menteri kami sampaikan terima kasih.

INSPEKTUR JENDERAL

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and several sweeping strokes below, ending in a small vertical tick mark.

M. RUM

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal;
2. Para Inspektur.

NOTA DINAS
NOMOR: B/747/IJ-IND.1/PR/VII/2023

Yth. : Inspektur Jenderal
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Hal : Penyampaian Laporan PP 39 Inspektorat Jenderal Triwulan II Tahun 2023
Lamp. : 1 (satu) berkas
Tanggal : 13 Juli 2023

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian, dengan ini kami lampirkan Laporan PP 39 Inspektorat Jenderal yang didalamnya berisikan capaian realisasi penyerapan anggaran pada Inspektorat Jenderal hingga Triwulan II Tahun 2023 yaitu Rp19.163.205.930,00 atau 43,56% dari total pagu anggaran sebesar Rp43.989.630.000,00.

Kegiatan yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal pada Triwulan II (April-Juni) 2023 adalah sebagai berikut:

- ✓ Pengawasan Kegiatan Hannover Messe;
- ✓ Rapat koordinasi pengawasan pada Direktorat Jenderal KPAII, IKFT, IKMA, ILMATE;
- ✓ Menghadiri rapat pimpinan terbatas dengan agenda Pembahasan Pengendalian Internal dan Penegakan Integritas Anti Korupsi;
- ✓ Pengawasan kegiatan prioritas satuan kerja;
- ✓ Rapat Koordinasi Internal Pembentukan Tim Pengawasan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Periode 2023-2024;
- ✓ Menyusun Populasi E-SPI Kementerian Perindustrian dan melakukan pemilihan sampling bersama Tenaga Ahli E-SPI KPK;
- ✓ Pemutakhiran SOP sesuai Proses Bisnis Inspektorat Jenderal terbaru.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara lebih lanjut kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Inspektorat Jenderal



Wawas Swathatafrijiah



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA



ASEAN
INDONESIA
2023

APIP
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

LAPORAN PP 39

2023



TRIWULAN II

INSPEKTORAT JENDERAL

KATA PENGANTAR

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Inspektorat Jenderal Triwulan II Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Jenderal yang telah saling mendukung dan bekerja keras sehingga tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dapat terlaksana dengan baik.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Inspektorat Jenderal, dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal.

Jakarta, Juli 2023
INSPEKTUR JENDERAL

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a horizontal line and a checkmark-like flourish.

M. RUM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
I.1. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal	1
I.2. Latar Belakang Kegiatan/Program	1
I.3. Struktur Organisasi	2
BAB II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN.....	10
A . Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2023.....	10
B. Sasaran Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2023.....	14
BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN	18
III.1. Hasil yang Telah Dicapai	18
III.2. Analisa Capaian Kinerja	21
III.3. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan.....	34
III.4. Langkah Tindak Lanjut.....	34
BAB IV. PENUTUP.....	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Program Inspektorat Jenderal.....	12
Tabel 2. Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal.....	14
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023.....	15
Tabel 4. Realisasi Keuangan Inspektorat Jenderal Triwulan II Tahun 2023	19
Tabel 5 Realisasi Anggaran Berdasarkan data SPAN 30 Juni 2023.....	20
Tabel 6 Progres Capaian RENSTRA Inspektorat Jenderal TW II 2023.....	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal	2
Gambar 2 Bagan Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal	4
Gambar 3 Bagan Organisasi Inspektorat I	5
Gambar 4 Bagan Organisasi Inspektorat II	7
Gambar 5 Bagan Organisasi Inspektorat III	8
Gambar 6 Bagan Organisasi Inspektorat IV	9

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

I.2. Latar Belakang Kegiatan/Program

Agar fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program/kegiatan tahun 2023 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal ditujukan untuk mendukung kelancaran administrasi dan manajemen pengawasan untuk mewujudkan upaya:

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi *post audit*, tetapi juga

sebagai *consulting partner* (mitra konsultasi) dan sebagai *Quality Assurance* (penjamin mutu) kegiatan unit kerja.

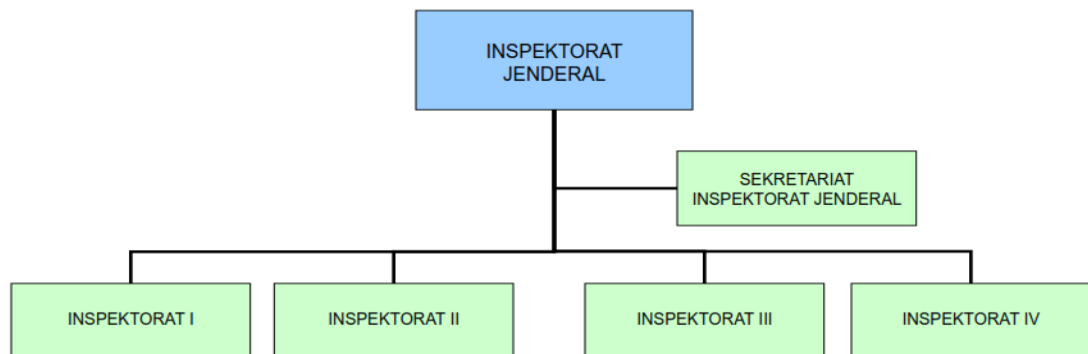
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

I.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian pasal 192, susunan organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- Inspektorat I;
- Inspektorat II;
- Inspektorat III; dan
- Inspektorat IV.

Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Inspektorat Jenderal;
- b) Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang pengawasan intern;
- c) Penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- d) Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama Inspektorat Jenderal;
- e) Penyiapan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat Inspektorat Jenderal;
- f) Penyiapan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, pengelolaan, analisis, dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern, serta evaluasi hasil pengawasan;
- g) Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan Inspektorat Jenderal;
- h) pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Inspektorat Jenderal; dan
- i) pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, rumah tangga, barang milik negara, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

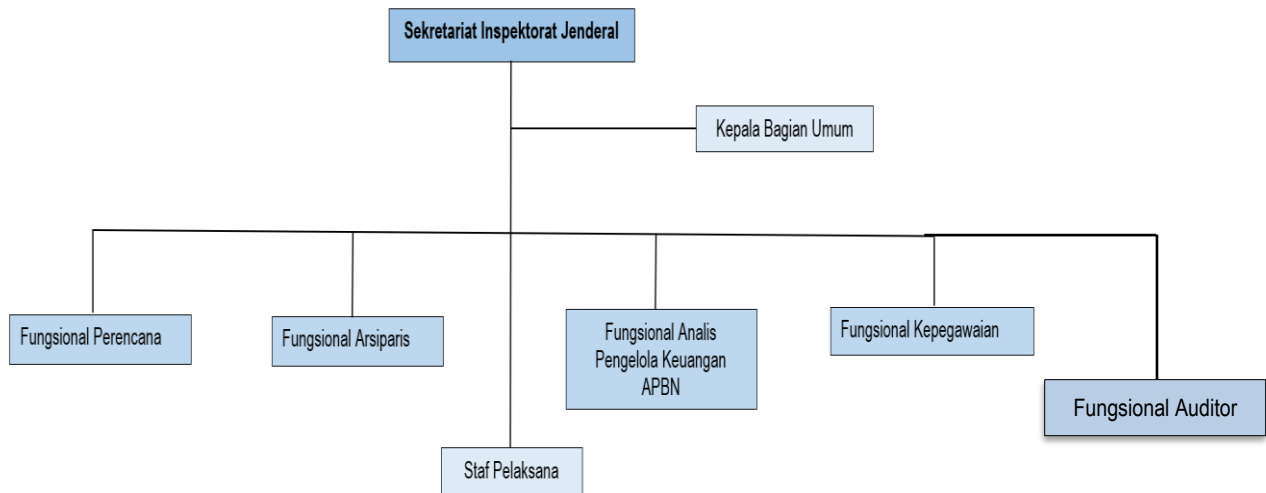
Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas :

- a. Bagian umum; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, rumah tangga, barang milik negara, serta manajemen kinerja Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan Inspektorat Jenderal;
- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan rumah tangga Inspektorat Jenderal;
- Pengelolaan barang milik negara Inspektorat Jenderal; dan
- Pelaksanaan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.



Gambar 2 Bagan Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal

1) Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- b) Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c) Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d) Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e) Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat I.

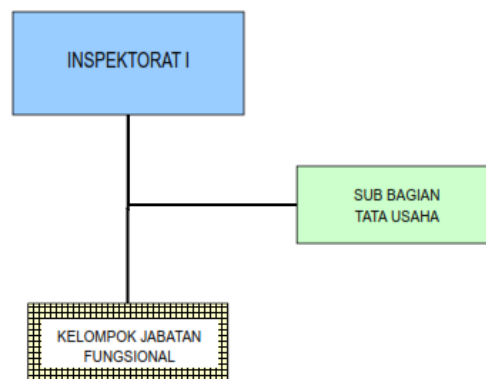
Inspektorat I terdiri dari:

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat I.

2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Organisasi Inspektorat I adalah sebagai berikut :



Gambar 3 Bagan Organisasi Inspektorat I

2) Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- b) Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c) Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d) Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e) Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat II.

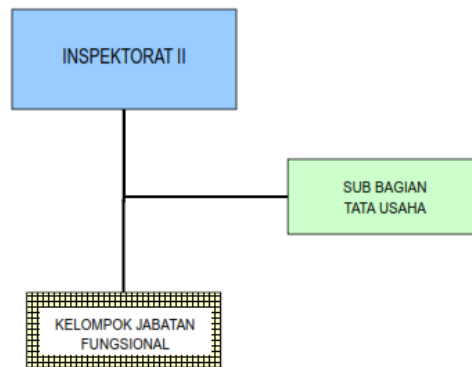
Inspektorat II terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat II.

2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan organisasi Inspektorat II adalah sebagai berikut :



Gambar 4 Bagan Organisasi Inspektorat II

3) Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi, dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- b) Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c) Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d) Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e) Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat III.

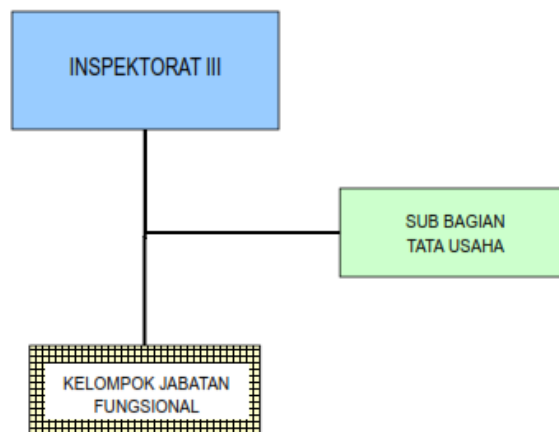
Inspektorat III terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha;

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat III.

2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan organisasi Inspektorat III adalah sebagai berikut :



Gambar 5 Bagan Organisasi Inspektorat III

4) Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pusat Pemberdayaan Industri Halal, dan perwakilan Kementerian Perindustrian di luar negeri. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- b) Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan

keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c) Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d) Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e) Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat IV.

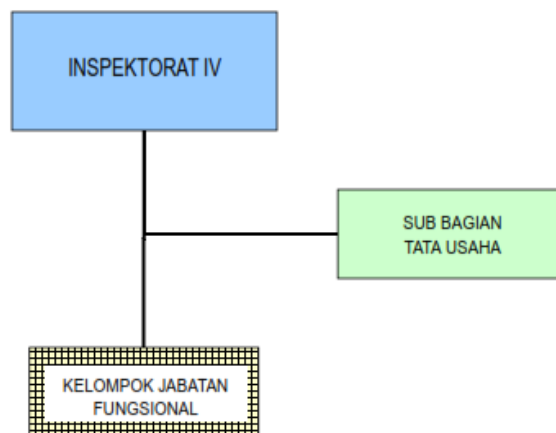
Inspektorat IV terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha;

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat Iv.

2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan organisasi Inspektorat IV adalah sebagai berikut :



Gambar 6 Bagan Organisasi Inspektorat IV

BAB II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

A. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2023

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa terdapat dua agenda pembangunan yang melibatkan peran penting industri yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas” dan “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Agenda pemerintah ini dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan akan dilakukan Kementerian Perindustrian yang tertuang pada Renstra Kemenperin 2020-2024, salah satunya adalah kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri dan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian mengemban tugas untuk melaksanakan “Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian”. Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pengawasan sebagai berikut:

1. Visi

Visi Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian mempunyai visi yang sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Inspektorat Jenderal mengemban misi yang sama dengan Kementerian Perindustrian maupun Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

3. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Inspektorat Jenderal selaras dengan tujuan Kementerian Perindustrian, yaitu *“Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional”* yang bercirikan:

- 1) Mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- 2) Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- 3) Mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian mengemban tugas untuk melaksanakan “Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian”, dengan kegiatan pada Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 1 Program Inspektorat Jenderal

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET
1	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat I - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat I - Layanan Audit Internal dan pada satker cakupan tugas Inspektorat I 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Laporan - 5 Laporan - 185 Laporan
2	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat II - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat II - Layanan Audit Internal dan pada satker cakupan tugas Inspektorat II 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Laporan - 5 Laporan - 20 Laporan
3	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat III - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat III - Layanan Audit Internal dan pada satker cakupan tugas Inspektorat III 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Laporan 5 Laporan - 115 Laporan
4	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat IV - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat IV - Layanan Audit Internal dan pada satker cakupan tugas Inspektorat IV 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Dokumen - 5 Dokumen - 30 Laporan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET
5	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Perangkat TIK - Layanan Hukum - Layanan Hubungan Masyarakat - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal - Layanan Umum - Layanan Perkantoran - Layanan Sarana Internal - Layanan Manajemen SDM - Layanan Perencanaan dan Penganggaran - Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Layanan Manajemen Keuangan - Layanan Audit Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Unit - 2 Layanan - 3 Layanan - 6 Layanan - 1 Layanan - 12 Layanan - 1 Unit -105 Pegawai - 1 Dokumen - 10 Dokumen - 12 Dokumen - 1 Dokumen

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian dapat tercapai targetnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang selama tahun 2023 dianggarkan dengan pagu anggaran sebesar Rp43.989.630.000,00.

B. Sasaran Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2023

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal

No	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target
1	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional	Mendukung tercapainya tujuan Kementerian Perindustrian melalui pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Nilai RB area penguatan pengawasan Kementerian Perindustrian	Nilai RB khusus untuk area penguatan pengawasan berdasarkan hasil PMPRB	Persentase	73%
			Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Indeks penerapan MRI Kementerian Perindustrian	Indeks	2,89
			Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Terwujudnya level IACM Kementerian Perindustrian melalui <i>self assessment</i> atau penilaian dari BPKP	Nilai	3,05

Dalam mewujudkan tujuan Inspektorat Jenderal, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Perspektif Pemangku Kepentingan dan Proses Bisnis Internal yang diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE				
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	1.1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1,2 %	Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <1,2% total anggaran Kementerian Perindustrian
		1.2 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	95%	Jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem Dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan yang telah masuk ke dalam sistem Dumas
		1.3 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	92%	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	2.1 Nilai RB area penguatan pengawasan	73%	Nilai pada area penguatan pengawasan dibandingkan total nilai dalam penilaian Reformasi Birokrasi
		2.2 Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	2,89	Hasil penilaian Indeks Manajemen Risiko berdasarkan <i>Quality Assurance</i> BPKP terhadap Kementerian Perindustrian
BUSINESS INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
3.		3.1 Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	80%	Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner,Capaian masing-masing Inspektorat diambil berdasarkan nilai unit kerja yang menjadi cakupan

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	3.2 Capaian IACM Inspektorat Jenderal	3,05	Hasil penilaian Level IACM oleh BPKP terhadap Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	4.1 Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU	85%	<p>Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri di Inspektorat Jenderal (R_{P3DN})=</p> $\frac{RAP_{3DN}}{TOTAP_{3DN}}$ <p>Keterangan: RA_{P3DN} = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk Dalam Negeri (DN) $TOTAP_{3DN}$ = Total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun yang telah disepakati yaitu, 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111</p>
5.	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	5.1 Efektivitas Regulasi yang ditetapkan di Lingkungan Inspektorat Jenderal	78%	<p>Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal didapatkan dari hasil moneyv melalui perhitungan yang dilakukan oleh masing-masing unit eselon I dengan melihat dari regulasi yang dijadikan sampel, apakah regulasi tersebut telah sesuai atau dapat mencapai target/tujuan dari regulasi tersebut di susun. Pengukuran efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin di hitung secara proporsional, dengan rumus:</p> $Er = \frac{SRe}{Ts}$ <p>Ket: Er = Nilai Efektivitas Regulasi SRe = Jumlah Sampel Regulasi yang tercapai tujuannya Ts = Jumlah Total Regulasi yang dijadikan sampel perhitungan</p> <p>Jumlah penyesuaian pedoman /prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dihitung dari jumlah program penyusunan yang dibuat</p>

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
6.	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	6.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78,6	Perhitungan nilai SAKIP Inspektorat Jenderal menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim Auditor Inspektorat Jenderal
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE				
7.	Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas	7.1 Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71	Perhitungan indeks merujuk pada peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut: a. 91-100 (sangat tinggi); b. 81-90 (tinggi); c. 71-80 (sedang); 61-70 (Rendah); e. 60 ke bawah (sangat rendah).

Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan tersebut dirinci dalam rencana aksi setiap triwulan, rencana aksi Inspektorat Jenderal Tahun 2023 terlampir pada dokumen ini.

BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

III.1. Hasil yang Telah Dicapai

Hingga/Pada Triwulan II Tahun 2023 Inspektorat Jenderal telah melakukan revisi DIPA sebanyak dua (2) kali dalam rangka mengakomodir kebutuhan kegiatan pengawasan dan dukungan pengawasan Inspektorat Jenderal ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, namun revisi ini tidak merubah pagu awal sebesar Rp 43.989.630.000,00 Kegiatan Inspektorat Jendral pada triwulan II ini mayoritas merupakan pelaksanaan kegiatan yang telah terlaksana dengan baik. Pada tanggal 21 Juni 2023, pandemi Covid-19 telah dinyatakan endemi oleh Presiden Jokowi. Oleh karena itu, pegawai telah resmi 100% bekerja dari kantor dengan *flexible working arrangement* pada situasi *new normal* ini.

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian hingga Triwulan II Tahun 2023 (Januari - Juni) mencapai Rp 19.163.205.930,00 atau 43,56% dari total pagu anggaran sebesar Rp 43.989.630.000,00.

Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi hasil evaluasi tahun 2022, upaya untuk meningkatkan capaian IACM Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian yaitu telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung per indikator penilaian, diantaranya pembaruan SOP sesuai proses bisnis saat ini, penyusunan pedoman pengawasan serta peningkatan kompetensi SDM. Tentunya kegiatan ini dapat terselenggara dengan dukungan anggaran yang memadai.

Tabel berikut menggambarkan pagu anggaran dan realisasinya sampai dengan TW II tahun 2023 :

Tabel 4. Realisasi Keuangan Inspektorat Jenderal Triwulan II Tahun 2023

Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi hingga Triwulan II		Jumlah di Blok/Revisi	Outstanding Kontrak	Dana Tersedia	
		Keuangan (Rp.)	%			Jumlah (Rp.)	%
Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	2.400.000.000	1.615.572.753	67,32	300,000,000	0	484.427.247	20,18
Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	2.300.000.000	682.689.203	29,68	300,000,000	0	1.317.310.797	57,27
Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	2.400.000.000	646.960.393	26,96	300,000,000	0	1.453.039.607	60,54
Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	2.300.000.000	849.912.719	36,95	300,000,000	0	1.150.087.281	50,00
Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal	34.589.630.000	15.368.070.862	44,43	3.208.001.000	0	16.013.558.138	46,29
TOTAL	43.989.630.000	19.163.205.930	43,56	4.408.001.000	0	20.418.423.070	46,41

Adapun realisasi anggaran per jenis belanja dilaporkan sebagai berikut:








Tabel 5 Realisasi Anggaran Berdasarkan data SPAN 30 Juni 2023








No	Kode Nama Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%	Outstanding Kontrak	Jumlah Diblok/Direvisi	Dana Tersedia
1	51 Belanja Pegawai	18.600.698.000	8.561.244.480	46,03	0	0	10.039.453.520
2	52 Belanja Barang	22.705.932.000	9.923.461.450	43,70	0	2.408.001.000	10.374.469.550
3	53 Belanja Modal	2.683.000.000	678.500.000	25,29	0	2.000.000.000	4.500.000
Jumlah		43.989.630.000	19.163.205.930	43,56	0	4.408.001.000	20.418.423.070
<i>Disclaimer: Realisasi berbasis aktual dan bersifat Bruto</i>							






Anggaran tersebut telah dimanfaatkan dengan cukup optimal, adapun hasil dari kegiatan yang telah dilakukan hingga triwulan II ini dapat tercermin pada capaian kinerja inspektorat Jenderal sekaligus progres capaian dari Rencana Strategis Inspektorat Jenderal pada Triwulan II diinformasikan pada tabel pada bagian analisa capaian kinerja.

III.2. Analisa Capaian Kinerja




Tabel 6 Progres Capaian Renstra Inspektorat Jenderal TW II 2023

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW II	Keterangan
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1,2%	Hasil dari koordinasi dan pemutakhiran data penyelesaian temuan hasil pengawasan eksternal Tahun 2022 masih belum dirilis oleh BPK	
		2 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti	95%	Berdasarkan Nota Dinas 07/IJ-IND.1/KK/VII/2023 sejak 1 April sampai 30 Juni 2023, telah menerima 35 pengaduan masyarakat secara online namun seluruhnya tidak berkadar pengawasan. Maka hingga triwulan II yaitu 75 pengaduan yang tidak berkadar pengawasan	
		3 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *IKU	92%	Rekomendasi hasil pengawasan internal tahun 2022 yang ditindaklanjuti oleh satker sebesar 87,91% dengan total rekomendasi 1257. Tindak Lanjut sesuai rekomendasi sebanyak 974, belum sesuai rekomendasi sebanyak 131 dan belum ditindaklanjuti sebanyak 152.	
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1 Nilai RB area penguatan pengawasan	73%	Belum dapat dilakukan penilaian karena terdapat perubahan peraturan	
		2 Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	2,89	Belum dilaksanakan penilaian maturitas SPIP dan Penjaminan Kualitas MRI Tahun 2023	
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1 Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	80%	Inspektorat I: belum dapat diukur Inspektorat II: 93,76% Inspektorat III: Inspektorat IV:	
		2 Capaian IACM Inspektorat Jenderal	3,05	Belum dilaksanakan pemenuhan dokumen dan penilaian IACM rencananya baru akan dilaksanakan pada triwulan III	

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW II	Keterangan
		3 Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	79%	Inspektorat I: Belum dapat diukur Inspektorat II: 86,66% Inspektorat III: Belum diukur Inspektorat IV: belum diukur	
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1 Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat Jenderal *)IKU	85%	Pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan produk dalam negeri pada Triwulan II. Berikut adalah realisasi PDN dibagi dengan Pagu anggaran 4.358.722.418/ 8.701.002.000 = 55,02%	
5.	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	1 Efektivitas Regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	78%	Belum dilaksanakan Survey Efektivitas regulasi bidang pengawasan yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	
6.	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78,6	Pada bulan Mei telah dilakukan Penilaian Dokumen SAKIP Eselon I, dengan nilai BB, atau 70,30	
7.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	1 Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Tahunan dengan PKPT	100%	Inspektorat I: belum dapat diukur Inspektorat II : 100% Inspektorat III: Belum diukur Inspektorat IV: belum diukur	
		2 Tingkat Kesesuaian Penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	Inspektorat I: belum dapat diukur Inspektorat II: 100% Inspektorat III: Belum diukur Inspektorat IV: belum diukur	
		3 Tingkat Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	74%	Survey kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal hingga 30 Juni 2023, yaitu 76,6%, pelaksanaan masih akan terus dilakukan hingga TW IV	

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW II	Keterangan
		4 Nilai Komponen Pengungkit . Penerapan RB Itjen	94%	Belum ada penilaian PMPRB karena masih menunggu pedoman terbaru	
		5 Nilai Indikator Kinerja . Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	76	Berdasarkan <i>Online Monitoring</i> , Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan II Tahun 2023 sebesar 95,26. Nilai IKPA ini bersifat fluktuatif sampai dengan akhir tahun anggaran.	
8.	Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas	1 Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71	Belum dilakukan pengukuran, baru akan diukur pada Triwulan IV.	
		2 <i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	70%	Masih dalam proses pelaksanaan	
		3 Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	77%	Masih dalam proses pelaksanaan dan belum dapat dihitung.	

Keterangan :

-  : Telah tercapai
-  : Dalam proses pelaksanaan
-  : Tidak tercapai

Berdasarkan hasil capaian yang diperoleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan II tahun 2023, terdapat satu indikator kinerja yang telah selesai dilaksanakan dan capaiannya sudah terlihat, yaitu indikator kinerja Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal. Indikator kinerja ini tidak tercapai berdasarkan hasil penilaian pada bulan Mei 2023, dengan nilai 70,30 (kategori BB). Dengan rincian nilai SAKIP sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Total	Predikat
	Inspektorat Jenderal	21.00	21.30	11.25	16.75	70.30	BB
1	Inspektorat I	21.60	21.90	10.50	16.75	70.30	BB
2	Inspektorat II	22.50	21.90	9.75	16.75	70.90	BB
3	Inspektorat III	21.00	21.90	10.50	16.75	70.15	BB
4	Inspektorat IV	22.50	20.40	10.80	16.75	70.45	BB
5	Sekretariat Itjen	22.50	22.80	11.50	18.00	74.85	BB

Indikator kinerja ini tidak berhasil mencapai target disebabkan beberapa hal yaitu:

1. Inspektorat Jenderal belum memiliki SOP/prosedur yang mengatur mekanisme penyusunan Renstra di lingkungan Inspektorat Jenderal. Selain itu, hanya beberapa SOP yang telah direvisi dan disesuaikan dengan SOTK terbaru Inspektorat Jenderal.
2. Indikator “Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan **Inspektorat Jenderal**” tidak relevan dengan sasaran “Terwujudnya regulasi **pembangunan industri** yang efektif”. Demikian juga sasaran tersebut tidak relevan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal yang berupa pengawasan internal, tidak terkait secara langsung dengan perumusan kebijakan di bidang industri.

3. Masih terdapat indikator yang belum memenuhi kriteria menantang yaitu :
 - a) Penetapan indikator Batas toleransi temuan material sebesar 1.3% tidak menantang, karena dalam dua tahun terakhir nilai materialitas temuan keuangan BPK berkisar pada angka 0.033%;
 - b) Masih terdapat target yang ditetapkan sama selama 2 (dua) tahun berturut-turut (**tidak meningkat**) untuk indikator "Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal"; "Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat";
 - c) Target Sasaran Kegiatan "Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat" kurang menantang;
 - d) Indikator "Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan yang Ditindaklanjuti pada Cakupan Tugas Inspektorat Jenderal" tidak cukup menantang untuk menjadi indikator kinerja yang baik karena sudah merupakan tugas dan kewajiban untuk menindaklanjuti setiap aduan.
 - e) Masih terdapat indikator kinerja yang dapat menjadi ukuran kinerja yang lebih baik dan menantang misalnya "Penurunan jumlah aduan berkadar pengawasan".
4. Terdapat perbedaan pengukuran data capaian indikator "Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)" berupa aplikasi yang didefinisikan dalam Renstra dengan data yang digunakan di lapangan, dan tidak dilakukan verifikasi oleh Sekretariat Itjen terhadap data capaian indikator tersebut yang dilaporkan dari masing-masing TU Inspektorat.
5. Belum terdapat bukti dokumentasi tertulis atas rapat evaluasi kinerja berkala secara berjenjang hingga level individu atau setidaknya Koordinator/Penanggungjawab kunci yang membahas upaya pencapaian, kendala, deviasi capaian, rekomendasi, tindak lanjut, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam menindaklanjuti setiap deviasi capaian yang ditemukan serta pemantauan terhadap tindak lanjutnya.

6. Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional, penyesuaian (Refocusing) Organisasi, dan penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.
7. Telah dilakukan reviu terhadap LAKIP oleh APIP maupun oleh internal Sekretariat Itjen. Namun demikian, reviu internal LAKIP yang dilakukan oleh Sekretariat belum didokumentasikan secara tertulis dalam bentuk dokumen hasil reviu yang dapat menunjukkan perbandingan perubahan LAKIP sebelum dan sesudah direviu beserta masukannya. Selain itu, belum terdapat mekanisme yang mengatur tata cara reviu internal LAKIP.
8. LAKIP telah disusun sesuai dengan standar dan telah menyajikan analisis yang diperlukan. Namun belum seluruh capaian indikator dilengkapi dengan analisis perbandingan dengan target jangka menengah. Indikator yang dilengkapi dengan perbandingan target jangka menengah hanya 2 (dua) yaitu “Batas toleransi temuan materialitas” dan “Indeks MRI”.
9. Tidak ditemukan bukti tertulis atas Rapat Pembahasan LAKIP yang melibatkan sekurang-kurangnya Koordinator kegiatan/Penanggung jawab kunci untuk masing-masing indikator (terutama yang diturunkan pada masing-masing Inspektorat). Sehingga tidak dapat dilihat pembahasan capaian, pengukuran, kendala, dll dari seluruh pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap target kinerja.
10. Tidak ditemukan bukti dokumentasi tertulis atas adanya Forum/Rapat/Edaran kepada seluruh pegawai yang menyajikan hasil-hasil capaian Sasaran Strategis beserta Indikator untuk Tahun Anggaran 2022 beserta pembahasan upaya/strategi pencapaian sasaran di tahun berikutnya.
11. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja internal telah dilaksanakan di semua level satker, dilakukan sesuai dengan standar dan oleh SDM yang memadai. Namun, pelaksanaan evaluasi AKIP internal belum

memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi mulai dari proses pengumpulan data sampai dengan penilaian.

12. Belum seluruh rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya telah selesai ditindaklanjuti.

Berdasarkan hal-hal diatas maka Inspektorat Jenderal mendapatkan rekomendasi sebagai berikut:

1. Inspektorat Jenderal perlu segera menyelesaikan rekomendasi tahun sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti terutama untuk penetapan Pedoman Evaluasi Internal atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian dan melengkapinya dengan suplementasi/panduan yang memadai untuk masing-masing kriteria pada LKE yang dapat diterapkan pada semua level satker Kementerian Perindustrian.
2. Melakukan penyesuaian SOTK pada seluruh SOP yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal sesuai dengan Permenperin No. 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.
3. Menyusun dan menetapkan SOP yang mengatur tentang mekanisme penyusunan Renstra dan Reviu terhadap LAKIP internal.
4. Inspektorat Jenderal perlu berkoordinasi dengan Biro Perencanaan untuk melakukan evaluasi terhadap relevansi sasaran strategis dan indikator yang ditetapkan untuk Inspektorat Jenderal dan melakukan penyesuaian terhadap indikator-indikator yang belum memenuhi kriteria SMART serta menyesuaikan target yang tidak menantang.
5. Merumuskan kembali definisi dan pengukuran indikator “Teknik Audit Berbantuan Komputer” dengan mengacu pada konsep/teori yang bersumber pada referensi yang andal dan menjelaskan tata cara pengukuran tersebut ke dalam Pedoman Kinerja yang dilampirkan

sebagai bagian dari Renstra Inspektorat Jenderal (mengacu pada format Renstra Kementerian Perindustrian).

6. Melakukan evaluasi kinerja berkala secara berjenjang dan mendokumentasikannya secara terperinci. Dokumen evaluasi tersebut setidaknya memuat pembahasan upaya pencapaian, kendala, deviasi atas capaian, rekomendasi, tindak lanjut, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam menindaklanjuti setiap deviasi capaian yang ditemukan serta melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut tersebut.
7. Berupaya mengoptimalkan pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai pertimbangan dalam :
 - a. penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional;
 - b. penyesuaian (Refocusing) Organisasi;
 - c. penyesuaian Startegi dan Kebijakan dalam mencapai kinerja.
 - d. mendokumentasikan analisis atas pertimbangan evaluasi kinerja dalam pengambilan keputusan terhadap hal-hal tersebut secara tertulis.
8. Melengkapi penyajian analisis capaian masing-masing indikator dalam LAKIP dengan analisis perbandingan terhadap target jangka menengah, dan menambahkan analisis kualitas capaian kinerja (misalnya: kualitas/keandalan data yang dilaporkan, keterbatasan dalam proses pengukuran data, kelemahan metode yang digunakan, dsb) yang dapat diperoleh melalui proses verifikasi data kinerja yang dilaporkan.
9. Mendokumentasikan setiap rapat pembahasan penyusunan LAKIP yang melibatkan sekurang-kurangnya setiap penanggungjawab/koordinator untuk masing-masing capaian indikator dan mendokumentasikan masukan/perbaikan dari hasil reviu berjenjang internal terhadap LAKIP dalam bentuk dokumen hasil reviu (selain Surat Pernyataan Telah Direviu).

10. Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi atau mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi yang ada dalam pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mulai dari pengumpulan dokumen pendukung sampai dengan proses penilaian.
11. Mendokumentasikan secara tertulis ataupun visual setiap penyampaian hasil-hasil capaian kinerja dalam LAKIP baik dalam Forum/Rapat/Edaran di awal tahun berikutnya beserta arahan Pimpinan dalam menghadapi tahun anggaran berikutnya.

Hingga Triwulan II Tahun 2023, kegiatan yang telah dilaksanakan di lingkungan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengawasan dan Pengawalan

- ✓ Pengawalan Kegiatan Hannover Messe;
- ✓ Rapat koordinasi pengawasan pada Direktorat Jenderal KPAII, IKFT, IKMA, ILMATE;
- ✓ Menghadiri rapat pimpinan terbatas dengan agenda Pembahasan Pengendalian Internal dan Penegakan Integritas Anti Korupsi;
- ✓ Kick-off Implementasi Permenperin No. 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas);
- ✓ Rapat internal terbatas dengan agenda Analisa Perkembangan Indeks Kepercayaan Industri;
- ✓ Rapat internal dengan Menteri Perindustrian dengan agenda pembahasan persiapan *Indo Pacific Economic Framework* (IPEF);
- ✓ Berperan sebagai Panitia Seleksi untuk Jabatan Atase Perindustrian di Tokyo serta Kepala Bidang Atase Perindustrian di Taipei;
- ✓ Audit Kinerja Inspektorat Jenderal;
- ✓ Pelaksanaan *desk audit* Dana Dekonsentrasi Bidang Perindustrian pada Ditjen IKMA;
- ✓ Persamaan Persepsi PMPZI di Lingkungan Kemenperin;
- ✓ Evaluasi SAKIP unit Eselon II Tahun 2022 pada BPSDMI, Sekretariat Jenderal, BSKJI, Inspektorat Jenderal, dan Pusdatin;

- ✓ Reviu buka blokir anggaran pengelolaan IMEI TA 2023;
- ✓ Reviu revisi anggaran pada Sekretariat Jenderal;
- ✓ Pemantauan progres fisik pembangunan Gedung Pendidikan SMK-SMAK Bogor;
- ✓ Pemantauan progres fisik pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Industri Petrokimia Cilegon;
- ✓ Pemantauan progres fisik pembangunan Gedung IMC Purwakarta;
- ✓ Pemantauan aset tanah Politeknik STTT Bandung;
- ✓ Pengawasan pelaksanaan kegiatan seleksi kompetensi calon Lembaga verifikasi independen.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Inspektorat I

- 1) Evaluasi SAKIP pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal;
- 2) Pemantauan progres fisik pembangunan Gedung Pendidikan SMK-SMAK Bogor;
- 3) Pemantauan progres fisik pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Industri Petrokimia Cilegon;
- 4) Pemantauan progres fisik pembangunan Gedung IMC Purwakarta;
- 5) Pemantauan aset tanah Politeknik STTT Bandung;
- 6) Pengawasan kegiatan Hannover Messe Tahun 2023;
- 7) Pembinaan dan pengawasan STTT Bandung.

b. Inspektorat II

- 1) Reviu buka blokir anggaran pengelolaan IMEI TA 2023;
- 2) Pelaksanaan Desk Audit Dana Dekonsentrasi Bidang Perindustrian pada Ditjen IKMA;
- 3) Audit dana dekonsentrasi pada Disperin Provinsi Kalimantan Selatan, Disperindag Provinsi Banten, Disperindagkop UKM Provinsi Kalimantan Timur, Disperindag ESDM Provinsi Kalimantan Barat, Disperindag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Disperindag

Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Disperindagkop UKM Provinsi Riau.

- 4) Pengawasan kegiatan penumbuhan dan pengembangan sentra IKM di Kabupaten Jepara;
- 5) Survei kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal.

c. Inspektorat III

- 1) Audit Kinerja Inspektorat Jenderal lanjutan;
- 2) Evaluasi SAKIP Unit Eselon II BSKJI, Unit Eselon II Inspektorat Jenderal, dan Pusdatin Tahun 2022;
- 3) Reviu PKPT TA 2023;
- 4) Reviu Anggaran Tahun 2023 – Bulan Juni
- 5) Survey Kepuasan Pelanggan Triwulan II TA 2023;
- 6) Audit kinerja BSPJIA Bogor;
- 7) Reviu revisi anggaran BBSPJIKFK, BBSPJIBBT, BSPJI Jakarta;
- 8) Pengujian lapangan Monev DAPATI;
- 9) Pengawasan BBSPJIKMLP Makassar;
- 10) Konsulting pengadaan BMN BBSPJIA Bogor.

d. Inspektorat IV

- 1) Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Seleksi Kompetensi Calon Lembaga Verifikasi Independen;
- 2) Pengawasan Pemeriksaan Pekerjaan/Pengadaan Indonesia sebagai Official Partner Country Hannover Messe 2023;
- 3) Reviu Revisi Anggaran pada Sekretariat Jenderal;
- 4) Pengawasan Pencapaian kinerja dan implementasi manajemen risiko pada Atase Perindustrian di Tokyo;
- 5) Cek fisik dalam rangka Audit Program dan kegiatan pada Ditjen KPAIL TA 2022;
- 6) FGD potensi kontribusi produk sektor IKFT dalam mendukung pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara;

- 7) Pendampingan Uji Petik TKDN Produk Alat Kesehatan pada PT. Astra Komponen Indonesia
- 8) Rapat Tim Teknis Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Pengolahan Kayu TA 2023;
- 9) Pengawasan RKI Komoditas Perikanan Tahun 2023.

3. Kegiatan Dukungan Pengawasan

Kegiatan dukungan pengawasan yang dilaksanakan pada bulan April – Juni 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Koordinasi Revisi DIPA Inspektorat Jenderal sampai dengan ke-6 yang terbit tanggal 15 Juni 2023;
- 2) Koordinasi awal dengan DJA terkait dengan pagu indikatif tahun anggaran 2024;
- 3) Input data hasil pengawasan ke dalam aplikasi SIMONTIN, telah dilaksanakan sesuai dengan ikhtisar hasil pengawasan yang diterima;
- 4) Penelaahan dokumen tindak lanjut hasil pengawasan internal, menetapkan status sementara dan input data hasil telaahan ke dalam aplikasi tindak lanjut, sesuai dokumen yang diterima;
- 5) Telah dilaksanakan koordinasi dengan auditor pemeriksa untuk verifikasi kesesuaian dokumen tindak lanjut dengan rekomendasi hasil pengawasan internal;
- 6) Menginventarisasi data dan dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal sesuai dengan dokumen yang disampaikan auditi kepada Inspektorat Jenderal;
- 7) Penelaahan dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI;
- 8) Menyusun Laporan Rakor Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- 9) Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Kerja Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;

- 10) Rapat Koordinasi Internal Pembentukan Tim Pengawasan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Periode 2023-2024;
- 11) Rapat Koordinasi Penyediaan Data Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 12) Sosialisasi Hasil Survei Penilaian Integritas Secara Elektronik Tahun 2022 dan Persiapan Pelaksanaan E-SPI Tahun 2023;
- 13) Melaporkan Hasil Capaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Kementerian Perindustrian Periode Triwulan, Bulan ke-3 (B03) kepada KPK;
- 14) Diskusi tentang hasil pelaporan B03 dan persiapan penyampaian pelaporan B06 Aksi Stranas PK periode Tahun 2023-2024 tentang Penguatan Pengendalian Ekspor dan Impor;
- 15) Menyusun Populasi E-SPI Kementerian Perindustrian dan melakukan pemilihan sampling melalui rumus slovin bersama Tenaga Ahli E-SPI KPK;
- 16) Finalisasi Peta Risiko Inspektorat Jenderal Tahun 2023;
- 17) Penyampaian Permintaan Peserta Diklat STAR BPKP;
- 18) Sosialisasi Perhitungan Formasi Perencana Tahun 2023 di Biro OSDM;
- 19) Rapat Penyusunan Peta Bisnis Inspektorat Jenderal;
- 20) Rapat Penyusunan Proses Bisnis Inspektorat Jenderal dan turunan SOP;
- 21) Penyelesaian laporan perbendaharaan rutin tiap bulan.
- 22) Penyusunan SOP tim kerja Program dan Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal antara lain:
 - a. SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
 - b. SOP Pengusulan Revisi Anggaran;

- c. SOP Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan.
- 23) Trilateral meeting pagu indikatif Inspektorat Jenderal TA 2024 bersama Bappenas dan DJA, dengan alokasi anggaran Rp 50.025.717.000,-
 - 24) Pembahasan pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) untuk aksi penguatan tata Kelola PNBK pada Komoditas Mineral dan Batu Bara;
 - 25) Koordinasi Rencana Aksi atas rekomendasi kajian kerentanan korupsi pada tata Kelola sertifikasi TKDN;
 - 26) Pengiriman peserta diklat Audit Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atas nama Hilma dan Wuryanto;
 - 27) Pengiriman peserta diklat pembentukan JFA Pertama atas nama Yon Handika, Gian Adhi, M. Iqbar Ardi, dan Afriyanto Yanuarista;
 - 28) *Entry Meeting* Penilaian Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP;
 - 29) Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Inspektorat Jenderal;
 - 30) Mengikuti Expo Pengawasan Intern Tahun 2023 yang diselenggarakan BPKP di TMII.

III.3. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Pada Triwulan II Tahun 2023, dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal belum terdapat hambatan yang berarti.

III.4. Langkah Tindak Lanjut

Sebagai upaya dalam pelaksanaan kegiatan di semester II tahun 2023, maka pimpinan memberikan arahan sebagai berikut:

1. Sesuai arahan Kemenkeu bahwa K/L diminta untuk mendukung kebijakan *Automatic Adjustment*, maka akselerasi realisasi

program/kegiatan di lingkungan Inspektorat Jenderal agar dilaksanakan sedemikian rupa menggunakan anggaran yang tersedia;

2. Berkoordinasi dengan semua pihak terkait melalui berbagai macam media baik online mauput secara langsung sehingga pelaksanaan kegiatan pengawasan tetap berjalan dengan lancar sesuai dengan target yang ditetapkan;
3. Koordinator kegiatan agar segera melaksanakan tahapan kegiatan sesuai dengan *timeline* yang telah disusun dengan memperhatikan keterkaitan pelaksanaan antar kegiatan.
4. Dalam rangka meningkatkan capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), maka tim kerja keuangan dan program perlu memantau capaian masing-masing indikator secara rutin setiap bulan dan akan mengadakan pengisian aplikasi bersama agar data yang dilaporkan sinkron, tentunya didukung oleh laporan realisasi kegiatan dan data-data yang akurat dari masing-masing unit eselon II;

BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian selama periode Triwulan II Tahun 2023 secara umum telah berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan.

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 (Januari-Juni) mencapai Rp19.163.205.930,00 atau 43,56 % dari total pagu anggaran sebesar Rp43.989.630.000,00. Dengan adanya jumlah yang di blokir atau di revisi sebesar Rp4.408.001.000,00 maka dana yang tersedia saat ini Rp20.418.423.070,00.

Anggaran yang tersedia diharapkan dapat dimanfaatkan dengan optimal melalui kegiatan-kegiatan pengawasan dan kegiatan dukungan manajemen pengawasan sehingga di akhir tahun 2023, perencanaan yang telah ditetapkan Inspektorat Jenderal dapat tercapai dengan efektif.

Dalam pelaksanaan kegiatan sasaran kinerja dan keluaran masih belum dapat dicapai walaupun pada triwulan ini merupakan tahapan pelaksanaan, namun pekerjaan rutin yang merupakan kegiatan pengawasan dan pelayanan internal tetap dapat dilaksanakan tanpa adanya kendala yang berarti.

Informasi capaian kinerja Triwulan II ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk evaluasi serta perbaikan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan berikutnya dan bahkan pada tahun berikutnya, agar target kinerja yang akan dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja TA 2023 dapat tercapai pada akhir tahun anggaran.

LAMPIRAN

Bukti Dukung Capaian Indikator Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan barang dan Jasa di Inspektorat Jenderal.

Realisasi Belanja PDN, TKDN, dan Impor terhadap Pagu Anggaran

No.	Unit Kerja	Pagu Anggaran	Realisasi PDN	Realisasi TKDN	Realisasi Impor	% Realisasi PDN + TKDN
1.	Sekretariat Jenderal	152.678.075.000	56.904.066.331	5.386.985.200	112.047.044	40,80%
2.	Direktorat Jenderal Industri Agro	34.620.404.000	6.694.056.273	197.000.000	916.826.060	19,90%
3.	Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	42.356.452.000	12.826.587.629	0	0	30,28%
4.	Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	42.260.907.000	10.904.482.624	700.391.452	529.987.063	27,46%
5.	Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka	544.017.367.000	70.123.124.011	37.438.499	1.169.905.851	12,90%
6.	Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional	147.095.726.000	43.922.400.971	0	20.572.748.946	29,86%
7.	Inspektorat Jenderal	8.701.002.000	4.358.722.418	428.500.000	0	55,02%
8.	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	196.631.718.000	50.598.672.596	6.904.279.092	8.358.948.446	29,24%
9.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	367.609.423.000	104.055.492.827	7.338.678.243	3.425.609.640	30,30%
Total		1.535.971.074.000	360.387.605.680	20.993.272.486	35.086.073.050	24,83%

No.	Indikator	Target	TW I		TW II		TW III		TW IV		Real. Fisik	Real. Keu	Capaian
			T	R	T	R	T	R	T	R			
1. SP.1 - Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian													
	S1.1 - Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *) IKU Pagu = Rp. 6.982.870.000 Realisasi = Rp. 2.034.879.324	1,3 Persen	15%	11%	30%	32%	45%	0%	60%	0%	32%	29%	0 Persen Tw1:0 Tw2:0 Tw3:0 Tw4:0
	S1.2 - Pengaduan masyarakat berkadat pengawasan yang ditindaklanjuti Pagu = Rp. 272.591.000 Realisasi = Rp. 21.933.332	90 Persen	5%	0%	10%	0%	15%	0%	20%	0%	0%	8%	0 Persen Tw1:0 Tw2:0 Tw3:0 Tw4:0
	S1.3 - Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *) IKU Pagu = Rp. 219.173.000 Realisasi = Rp. 47.456.504	92 Persen	5%	0%	18%	14%	35%	0%	40%	0%	14%	22%	0 Persen Tw1:72,2 Tw2:87,6 Tw3:0 Tw4:0
Total Pagu Sasaran = Rp. 7.474.634.000													
Total Realiasi Sasaran = Rp. 2.104.269.160 (28,2%)													
2. SP.2 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik													
	S2.1 - Nilai RB Area Penguatan Pengawasan Pagu = Rp. 43.000.000 Realisasi = Rp. 5.399.999	72 Persen	0%	0%	12%	0%	36%	0%	36%	0%	0%	13%	0 Persen Tw1:0 Tw2:0 Tw3:0 Tw4:0
	S2.2 - Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *) IKU Pagu = Rp. 139.275.000 Realisasi = Rp. 834.506	3 Level	5%	0%	10%	0%	25%	0%	40%	0%	0%	1%	0 Level Tw1:0 Tw2:0 Tw3:0 Tw4:0
Total Pagu Sasaran = Rp. 182.275.000													
Total Realiasi Sasaran = Rp. 6.234.505 (3,4%)													
3. SP.3 - Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif													
	S3.1 - Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal Pagu = Rp. 80.580.000 Realisasi = Rp. 6.924.495	80 Persen	7%	0%	10%	10%	13%	0%	17%	0%	10%	9%	0 Persen Tw1:0 Tw2:0 Tw3:0 Tw4:0
	S3.2 - Capaian IACM Itjen Pagu = Rp. 206.152.000 Realisasi = Rp. 6.750.000	3 Level	0%	0%	1%	0%	1%	0%	2%	0%	0%	3%	0 Level Tw1:0 Tw2:0 Tw3:0 Tw4:0
	S3.3 - Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer) Pagu = Rp. 0 Realisasi = Rp. 0	77 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 Persen Tw1:0 Tw2:0 Tw3:0 Tw4:0
Total Pagu Sasaran = Rp. 286.732.000													
Total Realiasi Sasaran = Rp. 13.674.495 (4,8%)													
4. SP.4 - Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri													
	S4.1 - Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *) IKU Pagu = Rp. 2.289.400.000 Realisasi = Rp. 72.350.192	80 Persen	16%	15%	19%	15%	22%	0%	25%	0%	15%	3%	0 Persen Tw1:0 Tw2:0 Tw3:0 Tw4:0
Total Pagu Sasaran = Rp. 2.289.400.000													
Total Realiasi Sasaran = Rp. 72.350.192 (3,2%)													
5. SP.5 - Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif													
	SS5.1 - Efektivitas Regulasi yang ditetapkan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Pagu = Rp. 76.910.000 Realisasi = Rp. 37.295.967	76 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	48%	0 Persen Tw1:0 Tw2:0 Tw3:0 Tw4:0
Total Pagu Sasaran = Rp. 76.910.000													
Total Realiasi Sasaran = Rp. 37.295.967 (48,5%)													
6. SP.6 - Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel													
	SP6.1 - Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal Pagu = Rp. 286.110.000 Realisasi = Rp. 2.700.000	78,4 Nilai	1%	1%	2%	1%	3%	0%	4%	0%	4%	1%	0 Nilai Tw1:0 Tw2:0 Tw3:0 Tw4:0
Total Pagu Sasaran = Rp. 286.110.000													
Total Realiasi Sasaran = Rp. 2.700.000 (0,9%)													
7. SP.7 - Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien													

SP7.1 - Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT Pagu = Rp. 85.428.000 Realisasi = Rp. 32.849.582	90 Persen	31%	23%	43%	40%	63%	0%	75%	0%	40%	38%	0 Persen Tw1:0 Tw2:0 Tw3:0 Tw4:0
SP7.2 - Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya Pagu = Rp. 332.473.000 Realisasi = Rp. 76.433.434	100 Persen	14%	14%	18%	20%	46%	0%	50%	0%	24%	23%	0 Persen Tw1:0 Tw2:0 Tw3:0 Tw4:0
SP7.3 - Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal Pagu = Rp. 11.003.430.000 Realisasi = Rp. 6.515.983.624	72 Persen	4%	0%	9%	0%	14%	0%	18%	0%	9%	59%	0 Persen Tw1:0 Tw2:0 Tw3:0 Tw4:0
SP7.4 - Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Inspektorat Jenderal Pagu = Rp. 12.000.000 Realisasi = Rp. 0	92 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 Persen Tw1:0 Tw2:0 Tw3:0 Tw4:0
SP7.5 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal Pagu = Rp. 70.600.000 Realisasi = Rp. 5.400.000	74,5 Nilai	24%	13%	48%	13%	73%	0%	95%	0%	84%	8%	0 Nilai Tw1:0 Tw2:0 Tw3:0 Tw4:0
Total Pagu Sasaran = Rp. 11.503.931.000												
Total Realiasi Sasaran = Rp. 6.630.666.640 (57,6%)												
8. SP.8 - Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas												
SP8.1 - Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal Pagu = Rp. 0 Realisasi = Rp. 0	73 Indeks	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 Indeks Tw1:0 Tw2:0 Tw3:0 Tw4:0
SP8.2 - Sharing Knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan Pagu = Rp. 9.000.000 Realisasi = Rp. 5.400.000	65 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	60%	0 Persen Tw1:0 Tw2:0 Tw3:0 Tw4:0
SP8.3 - Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat Pagu = Rp. 879.940.000 Realisasi = Rp. 102.099.615	76 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	12%	0 Persen Tw1:0 Tw2:0 Tw3:0 Tw4:0
Total Pagu Sasaran = Rp. 888.940.000												
Total Realiasi Sasaran = Rp. 107.499.615 (12,1%)												
9. SP.9 - Gaji dan Tunjangan												
SP9.1 - Gaji dan Tunjangan Pagu = Rp. 18.600.698.000 Realisasi = Rp. 9.776.415.265	12 layanan	25%	8%	50%	8%	75%	0%	100%	0%	50%	53%	0 layanan Tw1:0 Tw2:0 Tw3:0 Tw4:0
Total Pagu Sasaran = Rp. 18.600.698.000												
Total Realiasi Sasaran = Rp. 9.776.415.265 (52,6%)												
Total											Rp. 41.589.630.000	
Realisasi											Rp. 18.751.105.839 (45,1%)	

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN

TRIWULAN II
2023



#247885

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

REKAP PELAPORAN KOMPONEN

TRIWULAN II (PARSIAL)

Tahun : 2023

K/L : 019 - KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

UK. Eselon I : 06 - Inspektorat Jenderal

UK. Eselon II : 05 - Sekretariat Inspektorat Jenderal

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
6036.CAN.001 - Pengadaan Perangkat TIK														
1	051 Pengadaan Perangkat TIK	Pelaksanaan	tidak ada pengadaan TIK pada bulan Juni	32.00	Unit	1	0		2,289,400,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	tidak ada kendala
6036.EBA.957 - Layanan Hukum														
2	051 Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal	Pelaksanaan	Sebagai tindak lanjut dari Nota Dinas 520 SJ-IND.4/HK/V/2023 dari Biro Hukum, saat ini sedang dilakukan perbaikan dalam substansi pengaturan draft Keputusan Menteri yang merupakan turunan dari Peraturan MenpanRB No. 88 Tahun 2021 ttg SAKIP	32.00	Dokumen	2	1		106,400,000	37,296,000	35.05%	Belum	Tidak Ada Masalah	blm ada yang berarti
6036.EBA.958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi														
3	051 Pelayanan Hubungan Masyarakat	Pelaksanaan	kegiatan Itjen pada bulan Juni telah di publikasikan pada akun IG @itjenkemenperin dan website	39.00	Laporan	1	1		234,420,000	69,369,930	29.59%	Belum	Tidak Ada Masalah	tidak ada kendala
6036.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal														
4	051 Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	Pelaksanaan	Terdapat peraturan RB yang baru, pada bulan Juni ini telah dilaksanakan sosialisasi roadmap RB yang terbaru di Yogyakarta.	48.00	Dokumen	6	1		81,800,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	tidak ada kendala

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
6036.EBA.962 - Layanan Umum														
5	051 Pelayanan Umum dan Perlengkapan	Pelaksanaan	terdapat serah terima barang pengadaan pekerjaan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional kantor pada tanggal 9 Juni 2023	53.00	Layanan	1	0		3,271,788,000	1,110,843,315	33.95%	Belum	Tidak Ada Masalah	tidak ada kendala
6036.EBA.994 - Layanan Perkantoran														
6	001 Gaji dan Tunjangan	Pelaksanaan	Gaji & Tunjangan telah dibayarkan sampai Bulan Juni 2023	52.00	Layanan	12	3		18,600,698,000	5,445,987,363	29.28%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada kendala
7	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Pelaksanaan	terdapat serah terima barang pengadaan pekerjaan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional kantor pada tanggal 9 Juni 2023	50.00	Layanan	12	6		7,273,528,000	1,696,958,282	23.33%	Belum	Tidak Ada Masalah	tidak ada kendala
6036.EBB.951 - Layanan Sarana Internal														
8	051 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Pelaksanaan	terdapat serah terima barang pengadaan pekerjaan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional kantor pada tanggal 9 Juni 2023	50.00	Unit	1	0		393,600,000	133,000,000	33.79%	Belum	Tidak Ada Masalah	tidak ada kendala
6036.EBC.954 - Layanan Manajemen SDM														
9	051 Pengelolaan SDM Inspektorat Jenderal	Pelaksanaan	tidak ada diklat dan PKS yang dilaksanakan selama bulan Juni 2023	33.00	Orang	105	0		1,341,924,000	28,805,000	2.15%	Belum	Tidak Ada Masalah	ada kendala namun bisa teratasi
6036.EBD.952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
10	051 Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	Pelaksanaan	"Kegiatan yang telah dilaksanakan pada bulan Juni 2023: 1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) tim kerja Program dan Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal, antara lain: - SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran - SOP Pengusulan Revisi Anggaran - SOP Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan 2. Trilateral Meeting Pagu Indikatif Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2024 bersama dengan Bappenas dan DJA, dimana alokasi anggaran Inspektorat Jenderal pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 50.025.717.000,- 3. Penyusunan bahan Rapat Kerja Menteri Perindustrian bersama dengan DPR 4. Revisi Rencana Kerja pada Aplikasi KRISNA dengan melengkapi dokumen-dokumen pendukung seperti Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), revisi alokasi anggaran serta revisi output kegiatan 5. Revisi DIPA Inspektorat Jenderal ke-6 yang terbit pada tanggal 15 Juni 2023 6. Penyusunan bahan rapat evaluasi Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal sampai dengan Triwulan 2 7. Menghadiri Sosialisasi Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2024 dan Penerapan nilai TKDN pada pencairan anggaran di SAKTI"	54.00	Dokumen	1	0		54,000,000	5,400,000	10.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	tidak ada kendala
6036.EBD.953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi														
11	051 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Pelaksanaan	Laporan PP39 TW II masih dalam proses	50.00	Dokumen	10	2		64,302,000	2,700,000	4.20%	Belum	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
6036.EBD.955 - Layanan Manajemen Keuangan														
12	051 Pengelolaan Keuangan	Pelaksanaan	rekonsiliasi keuangan dan BMN hingga bulan Mei sudah dilakukan	58.00	Layanan	12	3		27,400,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
6036.EBD.965 - Layanan Audit Internal														
13	051 Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal	Pelaksanaan	dalam proses penyelesaian tindaklanjut, capaian saat ini 87,91%	55.00	Dokumen	1	0		850,370,000	20,424,000	2.40%	Belum	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
Kepala Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal

[masih kosong]



2023

DIREKTORAT SISTEM DAN PROSEDUR PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
KEDEPUTIAN PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

KEMENTERIAN PPN / BAPPENAS